

Judul : Satgas PKH tertibkan 4 juta Ha lahan, Senayan dukumh upaya nyata perbaiki kerusakan lingkungan
Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Satgas PKH Tertibkan 4 Juta Ha Lahan Senayan Dukung Upaya Nyata Perbaiki Kerusakan Lingkungan

Senayan mengapresiasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan di kawasan hutan. Negara mulai menata kembali kawasan hutan yang selama bertahun-tahun tergerus praktik ekonomi dan melanggar tata kelola.

ANGGOTA Komisi II DPR Azis Subekti mengatakan, pencapaian ini bukan kerjaan sederhana. Pasalnya, butuh keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta kerja sama lintas lembaga yang selama ini diketahui sering tersendat.

"Negara menunjukkan kemampuan untuk membenahi kekeliruan lama. Langkah penertiban ini jadi semakin relevan jika diletakkan dalam konteks bencana yang berulang di berbagai daerah," jelas Azis dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Azis menyebut, bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain memperlihatkan pola yang sama. Hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, lalu banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir.

Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat. Apalagi, penertiban berhasil menyentuh kawasan-

kawasan krusial yang lama jadi sorotan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Kehadiran negara di wilayah itu berhasil mengirim pesan penting. "Pesannya adalah, hukum dan kepentingan lingkungan tidak seharusnya selalu kalah dari kepentingan ekonomi jangka pendek," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Dia bilang, data yang disampaikan Pemerintah memperlihatkan besarnya persoalan yang dihadapi. Jutaan hektare sawit terbangun di dalam kawasan hutan, termasuk di kawasan lindung dan konservasi. Lalu, di banyak daerah tambang, bekas galian dibiarkan tanpa reklamasi yang memadai, bahkan berada di wilayah rawan bencana.

"Fakta-fakta itu menegaskan kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama longgar dan permisif," tegasnya.

Selanjutnya, tantangan yang lebih penting adalah memastikan dampak nyata di lapangan. Data, peta, dan capaian statistik harus diterjemahkan jadi pemulihan nyata. Kawasan perlu dihijaukan,



Azis Subekti

daerah tangkapan air harus dipulihkan, lalu lahan bekas tambang direhabilitasi serius, sehingga ini bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas.

"Untuk itu, gerakan bersama jadi kunci. Negara bisa menyiapkan kebijakan, anggaran, dan bibit tanaman, tapi masa depan hutan tidak akan pulih tanpa keterlibatan warga," katanya.

Menurutnya, kerja Pemerintah juga tidak akan cukup tanpa dukungan publik yang lebih luas. Masyarakat perlu aktif memberi masukan, menyampaikan data lapangan, serta melaporkan setiap pemanfaatan sumber daya ke hutan yang tidak sesuai peruntukan. Partisipasi ini penting agar penertiban kawasan hutan tidak berhenti sebagai proyek sesaat.

"Ini akan jadi kebijakan berkelanjutan yang diawasi bersama. Jika dilakukan, Indonesia akan jadi contoh bangsa yang belajar dari kerusakan, lalu bangkit," katanya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, hasil kerja Satgas PKH sebagai sinyal penting keseriusan negara menjaga kelestarian lingkungan. Kinerja Satgas PKH di awal ini mencerminkan kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola kawasan hutan. "Langkah itu penting untuk menghentikan praktik penyimpangan yang berlangsung lama," ucapnya.

Dia mengingatkan, seluruh proses penertiban harus terbuka, transparan, dan akuntabel. Agar tidak muncul persepsi tebang pilih dalam penindakan antarpemerintahan maupun antarwilayah. Satgas PKH harus memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil, berbasis data dan hukum, serta bebas konflik kepentingan.

"Untuk menjaga kepercayaan publik, Penertiban kawasan hutan tidak boleh hanya difokuskan pada wilayah tertentu," katanya.

Daniel menambahkan, Pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan atas dampak sosial dari pengambilalihan lahan. Karena penegakan hukum harus berjalan

seiring penciptaan solusi ekonomi. Lapangan kerja baru dan skema pemanfaatan lahan harus berkelanjutan agar penertiban kawasan hutan tidak hanya sekadar menegakkan aturan.

"Penertiban kawasan hutan harus menghadirkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan bagi masyarakat," tegasnya.

Diketahui, selain mengambil alih kembali lahan di kawasan hutan, Satgas PKH juga mencahut izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan. Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan, pencabutan izin dilakukan tanpa tebang pilih karena telah melalui proses investigasi berkelanjutan.

Satgas, kata Barita, telah melakukan serangkaian penelitian, penyelidikan, investigasi hingga audit secara menyeluruh. Hasil investigasi itu kemudian dilaporkan pada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama Satgas PKH dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan pemeriksaan ulang atau *cross-check*.

"Sistem pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan tergolong ketat, dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegasnya. ■ PYB